

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENJA 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B.302.1/BKPSDM/SET-3/784/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas perencanaan kegiatan dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperlukan adanya Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 melaksanakan

tugas Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 7 Maret 2022

**KEPALA,**
H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19660107 200012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : B.302.1/BKPSDM/SET.3/784/03/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua : Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan
Anggota :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
5. Sub Koordinator Disiplin dan Penghargaan
6. Sub Koordinator Diklat Fungsional
7. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
9. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi
10. Sub Koordinator Fasilitas Profesi ASN
11. Sub Koordinator Penjurangan dan Sertifikasi
12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
13. Sub Koordinator Data Informasi
14. Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi
15. Sub Koordinator Mutasi
16. Sub Koordinator Promosi ASN

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 07 Maret 2022



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA

NIP. 19660107 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang memuat Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun ke depan.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Program Dedikasi Kukar IDAMAN.

Tenggarong, 10 Agustus 2022



KPRALA,
H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003

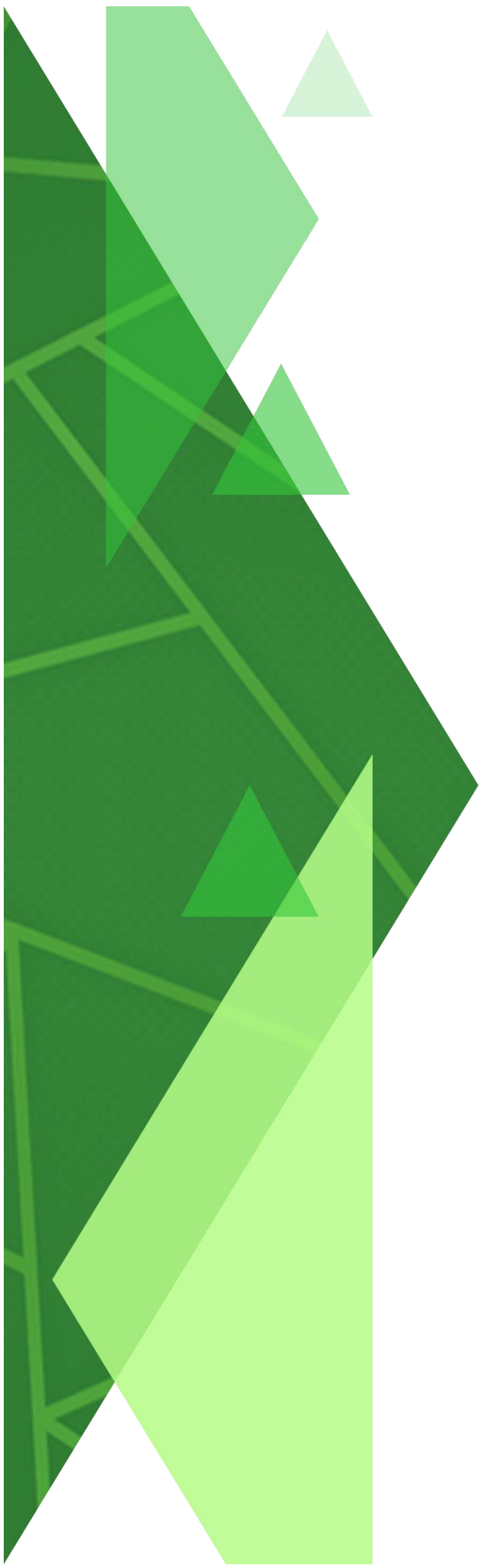


DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-2
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU	II-7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM	II-7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-20
2.3	Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	II-24
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2023	II-24
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-30
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM	III-31
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-31
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	III-35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	IV-37
4.1	Program dan Kegiatan	IV-37
BAB V	PENUTUP	V-43

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2021 BKPSDM	II-14
Tabel II.2	Capaian IKU Tahun 2021	II-19
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-21
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 BKPSDM	II-25
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	II-30
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	III-36
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 BKPSDM	IV-39



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2023 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18201);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Renja Tahun 2023 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun (2023).

1.3.2 Tujuan :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2023) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) Bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

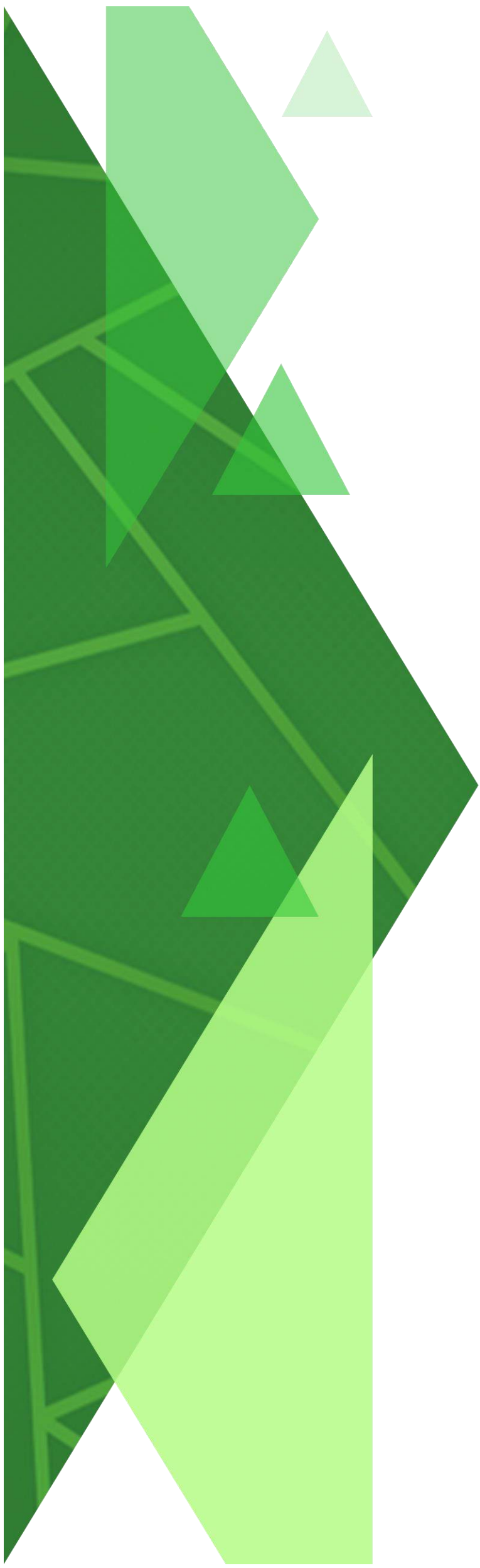
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM



BAB II

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (tiga) program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Realisasi program tahun anggaran 2021 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1.1 Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja, target kinerja 100,00% dengan realisasi kinerja 100,00%
 - 1.2 Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset, target kinerja 100%, dengan realisasi kinerja 100,00%
 - 1.3 Rata-rata Nilai kinerja SKP, target kinerja 85,84 dengan realisasi 80,30 (93,55%)
 - 1.4 Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 100,00% dengan realisasi 100,00%
 - 1.5 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik, target kinerja 80,00% dengan realisasi 84,80%
 - 1.6 Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 100,00% dengan realisasi 100,00%.

Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 19 dokumen, dengan realisasi 19 dokumen (100,00%)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (100,00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 16 dokumen, dengan realisasi 16 dokumen (100,00%)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100,00%)
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100,00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 1 laporan, dengan realisasi 1 laporan (100,00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target kinerja 12 laporan, dengan realisasi 12 laporan (100,00%)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 1 laporan, dengan realisasi 1 laporan (100,00%)
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 50 ASN, dengan realisasi kinerja 40 ASN (80,00%);
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 50 ASN, dengan realisasi 40 ASN (80,00%)
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 7 layanan, dengan realisasi 7 layanan (100,00%);
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 paket, dengan realisasi 1 paket (100,00%);
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 4503 porsi, realisasi kinerja 4349 porsi (96,58%);
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 4 paket, dengan realisasi 4 paket (100,00%);

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 2870 exemplar, realisasi 2852 exemplar (99,37%);
 - Fasilitas Kunjungan Tamu, target kinerja 10 fasilitas, realisasi 4 fasilitas (40,00%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 100 perjalanan, realisasi kinerja 100 perjalanan (100,00%);
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 450 dokumen, realisasi 450 dokumen (100,00%).
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 2 layanan, dengan realisasi kinerja 2 layanan (100,00%);
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 2 paket, realisasi 2 paket (100,00%);
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 2 paket, realisasi 2 paket (100,00%).
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 4 layanan, dengan realisasi kinerja 4 layanan (100,00%);
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 300 surat, dengan realisasi 188 surat (62,67%);
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 132 rekening, dengan realisasi 126 rekening (95,45%);
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 140 unit, dengan realisasi 140 unit (100,00%); dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 276 THL, dengan realisasi 276 THL (100,00%).
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 1 layanan, dengan realisasi 1 layanan (100,00%).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 16 unit, dengan realisasi 16 unit (100,00%).

2. Program Kepegawaian Daerah :

- 2.1 Persentase Bezetting dalam pengisian formasi, target kinerja 95,00% dengan realisasi 51,00%
- 2.2 Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP, target kinerja 95,00% dengan realisasi 67,00%
- 2.3 Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir, target kinerja 100,00% dengan realisasi 95,60%
- 2.4 Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP, target kinerja 85,00% dengan realisasi 72,10%
- 2.5 Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN, target kinerja 75,00% dengan realisasi 25,00%
- 2.6 Tingkat pengembangan kompetensi ASN, target kinerja 54,00% dengan realisasi kinerja 24,00%
- 2.7 Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76, target kinerja 95,00% dengan realisasi 73,38%
- 2.8 Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan, target kinerja 85,00% dengan realisasi 60,00%

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 1204 formasi, dengan realisasi 212 formasi (17,61%);
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN, target kinerja 429 SK, dengan realisasi 433 SK (100,93%);
 - Fasilitasi lembaga profesi ASN, target kinerja 250 fasilitasi, dengan realisasi 399 fasilitasi (159,60%);
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 2 laporan, dengan realisasi 2 laporan (100,00%); dan
 - Pengelolaan data Kepegawaian, target kinerja 6000 data, dengan realisasi 5588 data (93,13%).

- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi, target kinerja 3 layanan, dengan realisasi 3 layanan (100,00%);
 - Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 512 SK, realisasi 5894 SK (1151,17%);
 - Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 2500 SK, dengan realisasi 2249 SK (89,96%); dan
 - Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 15 fasilitasi, dengan realisasi kinerja 9 fasilitasi (60,00%).
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, target kinerja 4 layanan, dengan realisasi 4 layanan (100,00%);
 - Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 180 peserta, dengan realisasi 212 peserta (117,78%);
 - Pengelolaan Assesment Center, target kinerja 150 peserta, dengan realisasi 97 peserta (64,67%);
 - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 12 peserta, dengan realisasi 13 peserta (108,33%); dan
 - Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN, target kinerja 12 peserta, dengan realisasi 11 peserta (91,67%).
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 5 layanan, dengan realisasi 5 layanan (100,00%)
 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 6980 dokumen, dengan realisasi 11438 dokumen (163,87%);
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
 - Pembinaan disiplin ASN, target kinerja 58 laporan, dengan realisasi kinerja 51 laporan (87,93%); dan
 - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 20 kasus, dengan realisasi kinerja 12 kasus (60,00%).
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, target kinerja 75,00%, dengan realisasi 69,00% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, target kinerja 240 peserta, dengan realisasi 280 (116,67%)

- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, target kinerja 240 peserta, dengan realisasi 280 peserta (116,67%).
- b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, target kinerja 116 peserta, dengan realisasi 121 peserta (104,31%)
 - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 116 peserta, dengan realisasi 121 peserta (104,31%)

Hal-hal yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan tahun 2021 antara lain :

1. Kesadaran PNS di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membuat dan menyampaikan laporan SKP masih rendah;
2. Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan;
3. Volume pelaksanaan rapat-rapat dalam masa pandemi covid-19 tidak sesuai target kinerja yang ditetapkan;
4. Kebutuhan bahan bacaan di awal tahun lebih kecil sehingga realisasi selama satu tahun kurang dari target kinerja;
5. Narasumber kegiatan tidak bisa hadir secara tatap muka;
6. Kekeliruan dalam perhitungan jumlah surat/dokumen yang dikirim;
7. Adanya fluktuasi beban biaya;
8. Pelaksanaan seleksi kompetensi Calon ASN mengikuti jadwal dari BKN, terkendala pemutakhiran data dari pusat dan pandemi Covid 19, seleksi dan penetapan kelulusan sampai akhir Desember 2021 yang sudah dilaksanakan hanya CPNS dan CPPPK Non Guru. Untuk CPPPK Guru, pihak pusat (BKN dan Kemendikbudristek) baru menyelesaikan 1 tahap dari 3 tahap yang disusun;
9. Dokumen pendukung data ASN tidak lengkap, dan Perangkat Daerah tidak melaporkan data ASN secara rutin;

10. Proses seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 berpengaruh terhadap proses penerbitan persetujuan teknis pensiun, kenaikan pangkat dan layanan dokumen kepegawaian lainnya, karena pengelola kepegawaian di BKN Regional terlibat dalam proses kegiatan dimaksud;
11. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Golongan IV/a keatas menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi;
12. Dalam kegiatan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dan SK tersebut membutuhkan waktu karena fokus kerja terbagi dengan kab/kota lain yg ada di provinsi Kalimantan Timur;
13. Belum ada lembaga assesment center yang dapat melakukan assesmen full virtual yang sesuai standar pemerintah;
14. Perangkat daerah tidak menyampaikan laporan tingkat kehadiran PNS dan
15. Dokumen penjatuhan hukuman disiplin tidak lengkap dan mekanisme pelaksanaan penjatuhan hukuman tidak sesuai prosedur.

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 pada tabel II.1 (T-C.29) sebagai berikut:

Tabel II.1 (T-C.29)
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022**
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja-PD Tahun (2021)	Realisasi Renja-PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 05										
4 05 01	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	89 Nilai	73,98 Nilai	85 Nilai	75,89 Nilai	89,28%	80 Nilai	80 Nilai	89,89%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227 Dokumen	110 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100,00%	24 Dokumen	153 Dokumen	67,40%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64 Dokumen	32 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	7 Dokumen	42 Dokumen	65,63%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150 Laporan	75 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	15 Laporan	106 Laporan	70,67%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%	2 Laporan	5 Laporan	38,46%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	164 Laporan	89 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	15 Laporan	116 Laporan	70,73%

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11880 orang/bulan	6480 orang/bulan	1080 orang/bulan	1035 orang/bulan	95,83%	2124 orang/bulan	9639 orang/bulan	81,14%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	7 Laporan	70,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	120 Laporan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	84 Laporan	70,00%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	13 Dokumen	65,00%
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Laporan	13 Laporan	65,00%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	13 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	38,46%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	417 Paket	117 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00%	150 Paket	267 Paket	64,03%
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280 Orang	30 Orang	50 Orang	40 Orang	80,00%	50 Orang	120 Orang	42,86%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	46 Layanan	8 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	100,00%	6 Layanan	21 Layanan	45,65%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	2 Paket	40,00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	9 Paket	50,00%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00%	3 Paket	9 Paket	50,00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40889 Dokumen	34504 Dokumen	2870 Dokumen	2852 Dokumen	99,37%	1277 Dokumen	38633 Dokumen	94,48%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	35 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	40,00%	5 Laporan	19 Laporan	54,29%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1554 Laporan	1054 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100,00%	100 Laporan	1254 Laporan	80,69%

			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3250 Dokumen	1000 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	100,00%	450 Dokumen	1900 Dokumen	58,46%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00%	100 Persen	100 Persen	100,00%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	1 Unit	8 Unit	80,00%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	1 Unit	7 Unit	77,78%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	7 Laporan	70,00%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	7 Laporan	70,00%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	7 Laporan	70,00%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	7 Laporan	70,00%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	101 Unit	41 Unit	16 Unit	16 Unit	100,00%	12 Unit	69 Unit	68,32%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	101 Unit	41 Unit	16 Unit	16 Unit	100,00%	12 Unit	69 Unit	68,32%
			Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	96 Persen	91,5 Persen	91,5 Persen	91,5 Persen	100,00%	92 Persen	92 Persen	95,83%
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	7545 ASN	1407 ASN	1633 ASN	645 ASN	39,50%	1058 ASN	3110 ASN	41,22%
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	7 Dokumen	70,00%

			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	42,86%
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	10 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
			Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	7 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%	1 Lembaga	3 Lembaga	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
			Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	42,86%
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	42,86%
			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosikan	15779 ASN	2510 ASN	3012 ASN	8143 ASN	270,35%	2790 ASN	13443 ASN	85,20%
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	6 Dokumen	60,00%
			Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	6 Dokumen	60,00%
			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	6 Dokumen	60,00%
			Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	3080 ASN	680 ASN	342 ASN	322 ASN	94,15%	560 ASN	1562 ASN	50,71%
			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1785 Orang	285 Orang	180 Orang	212 Orang	117,78%	380 Orang	877 Orang	49,13%
			Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	9 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	5 Dokumen	55,56%
			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	563 Orang	63 Orang	12 Orang	13 Orang	108,33%	197 Orang	273 Orang	48,49%
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	73643 ASN	13514 ASN	12985 ASN	11438 ASN	88,09%	13084 ASN	38036 ASN	51,65%
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	n/a Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00%
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	6 Dokumen	60,00%

			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	6 Laporan	60,00%
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1740 Orang	n/a Orang	n/a Orang	n/a Orang	0,00%	348 Orang	348 Orang	20,00%
			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	147 Laporan	60 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	60,00%	15 Laporan	87 Laporan	59,18%
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	n/a Dokumen	n/a Dokumen	n/a Dokumen	0,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00%
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									0,00%
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26,64 Persen	17,22 Persen	17,5 Persen	17,22 Persen	98,40%	18,38 Persen	20,65 Persen	77,52%
			Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	2496 ASN	1486 ASN	240 ASN	280 ASN	116,67%	210 ASN	1976 ASN	79,17%
			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2496 Orang	1486 Orang	240 Orang	280 Orang	116,67%	210 Orang	1976 Orang	79,17%
			Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1245 ASN	673 ASN	116 ASN	121 ASN	104,31%	120 ASN	914 ASN	73,41%
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	47 orang	5 orang	12 orang	11 orang	91,67%	12 orang	28 orang	59,57%
			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	6 Laporan	60,00%

Untuk capaian sasaran strategis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 Capaian IKU Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat	75	73,98	98.64	85	75,89	89,28	Menurun
Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	40,25	53,67	80	42,45	53,06	Menurun
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	80	76,62	95,78	85	83,5	98,24	Menurun
Rata-rata Capaian Kinerja						82,69		80,19	

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya proses penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan BKD Provinsi, BKN Regional dan BKN Pusat terkait waktu penyelesaian dokumen kepegawaian;
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/ASN bahwa seluruh layanan di BKPSDM tidak dipungut biaya;
5. Kurangnya respon atas pengaduan, saran dan masukan;
6. Masih terdapat 5.632 PNS Kabupaten Kutai Kartanegara yang pendidikannya di bawah S.1;
7. Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS belum maksimal; dan

8. Data kualifikasi, pengembangan kompetensi dan kinerja PNS belum seluruhnya diupdate ke SAPK.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel II.3 (T-C.30) berikut:

Tabel II.3 (T-C.30)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Tujuan BKPSDM												
1.	Indeks Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			61	65	70	75	80	40,45		61	65	
	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat <i>Impact</i>												
1.	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			80	82	85	87	89	83,50		80	82	
	Indikator Kinerja Kunci												
1			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	38	39	40	41	42	36,94		38	39	
2			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13	14	15	16	17	11,87		13	14	
3			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90	92	94	96	98	12,96		90	92	
	Indikator Kinerja Program setingkat <i>Outcome</i>												
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	87	88	89	75,89		85	86	

2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			92	93	94	95	96	91,50		92	93	
3	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	17,22		18,38	20,65	
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	23	24	23	23	19		24	23	
2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15	15	15	15	15	12		15	15	
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	1		2	2	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	2	2	3	2	1		1	2	
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	7	8	8	8	7		7	7	
6	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100		100	100	
7	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12		12	12	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	16		12	12	
9	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan			1058	1147	1262	1365	1306	645		1058	1147	
10	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan			2790	2928	2583	2495	2473	8143		2790	2928	
11	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			560	560	560	360	360	322		560	560	
12	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			13084	12607	12093	11491	10854	11438		13084	12607	
13	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis			210	200	200	200	200	280		210	200	

14	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			120	122	112	106	112	116		120	122	
----	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	--

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian yaitu:

- a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
- b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
- e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
- f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
- g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2023

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Sebagaimana Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel II-4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Perangkat Daerah	86 Nilai	13.807.806.535,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Perangkat Daerah	86 Nilai	23.713.350.229,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 dokumen	185.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 dokume n	185.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	65.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	55.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	65.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	65.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan	10.494.641.295,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 laporan	20.395.184.989,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080 orang/bulan	10.344.641.295,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1848 ASN/bula n	20.250.184.989,00	Penambahan pagu untuk gaji PNS Dinas ESDM dan Set KORPRI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	50.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	95.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 laporan	45.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 laporan	44.840.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	45.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	44.840.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	190.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	190.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	140.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	140.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	50.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.061.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.061.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	200.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	200.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1277 exemplar	21.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1277 exemplar	21.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	125.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	315.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	315.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 dokumen	100.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	387.750.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	387.750.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	287.750.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37 unit	287.750.000,00	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	100.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.119.415.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	1.642.261.020,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	170.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	170.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	112.057.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	827.415.240,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.338.204.020,00	Penambahan pagu untuk pembayaran gaji THL Dinas ESDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12 unit	325.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12 unit	300.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	325.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	300.000.000,00	
	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen	3.565.000.000,00	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen	4.071.061.000,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1147 ASN	1.325.000.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1147 ASN	1.325.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	450.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	450.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	100.000.000,00	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	500.000.000,00	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	500.000.000,00	Program Aparatur Negara Bahagia
	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	100.000.000,00	

	Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	100.000.000,00	Evaluasi Data,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah dokumen evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	100.000.000,00	
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2928 ASN	625.000.000,00	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2928 ASN	625.000.000,00	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	225.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	225.000.000,00	Program Disapa
	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dokumen	200.000.000,00	
	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 dokumen	200.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	560 PNS	1.075.000.000,00	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	387 PNS	1.581.061.000,00	
	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	380 orang	350.000.000,00	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 orang	350.000.000,00	Program Disapa
	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	350.000.000,00	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	350.000.000,00	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 orang	375.000.000,00	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	107 orang	881.061.000,00	Penambahan pagu untuk tambahan 7 orang PNS Tugas Belajar
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12607 ASN	540.000.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12607 ASN	540.000.000,00	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	125.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	125.000.000,00	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	75.000.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	75.000.000,00	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 orang	90.000.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 orang	90.000.000,00	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100.000.000,00	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100.000.000,00	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 dokumen	50.000.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 dokumen	50.000.000,00	Menyesuaikan Renstra
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 persen	2.130.000.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 persen	4.152.098.000,00	
	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200 ASN	400.000.000,00	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	120 ASN	400.000.000,00	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 orang	400.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 orang	400.000.000,00	
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan	122 ASN	1.730.000.000,00	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan	412 ASN	3.752.098.000,00	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang	230.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang	230.000.000,00	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.500.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	3.522.098.000,00	Penambahan pagu untuk mandatory pelaksanaan diklat khusus Pejabat Fungsional terdampak penyetaraan jabatan
	JUMLAH				19.502.806.535,00					31.936.509.229,00	

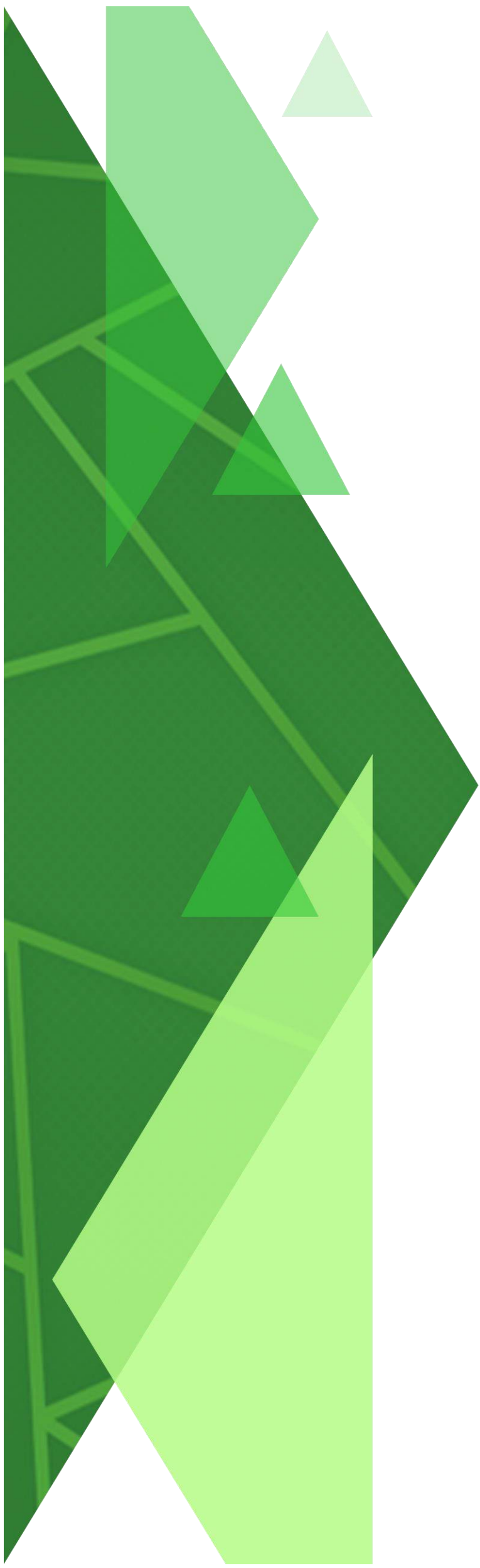
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel II-5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tidak ada



BAB III

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki visi **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong” dan misi “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”**. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*;
- b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
- d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
- e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
- d. Transformasi pelayanan publik.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.

B. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan**

Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021-2026 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

C. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin

diwujudkan LAN adalah **“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
- b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten;
- c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;
- d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

D. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi **“Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”** yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

- a. Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
- b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
- e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
- f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
- g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 1(satu) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

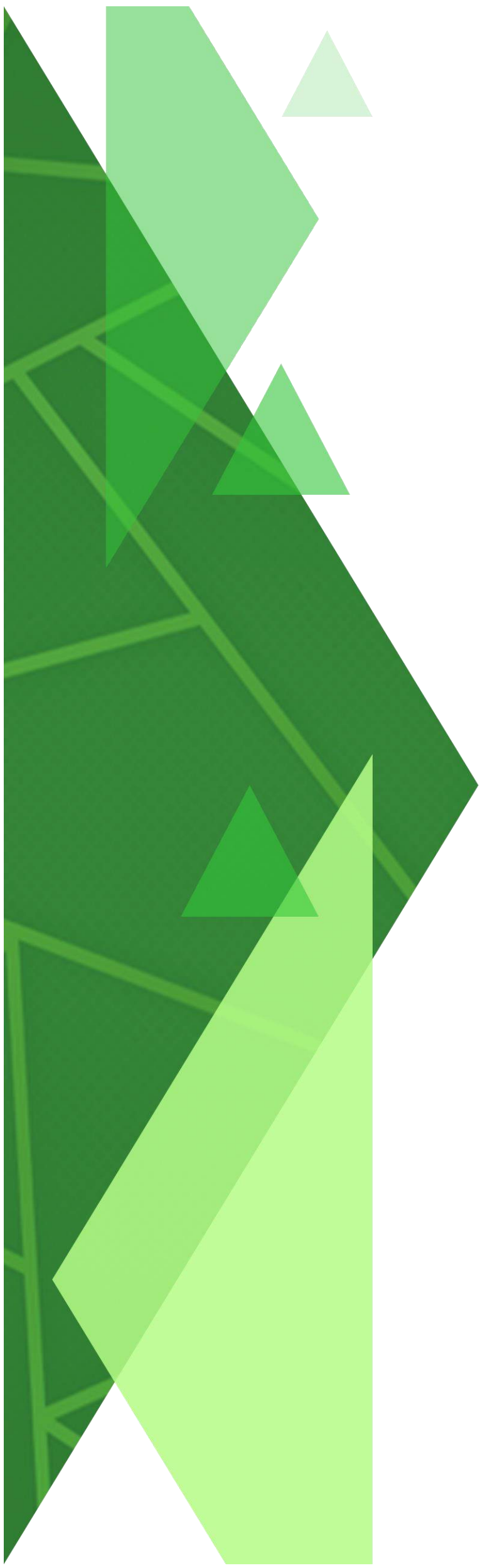
Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.
Sasaran dari tujuan tersebut yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran renja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN		TARGET RENJA TAHUN 2023
	URAIAN	INDIKATOR	
Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			65
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82



BAB IV

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Pencapaian tujuan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.
4. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM
5. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan analisis kebutuhan.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 31.936.509.229,00.

Kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain di Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 difokuskan untuk mendukung program kerja Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam program dedikasi KUKAR IDAMAN. Dalam upaya mendukung program dedikasi

tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk melaksanakan Program Aparatur Negara Bahagia dan Program Digitalisasi Pelayanan Publik.

Program Aparatur Negara Bahagia merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT. Dalam program ini BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk merevitalisasi Koperasi ASN Panca Prasetya dan memastikan keberadaan koperasi ASN eksis, aktif dan produktif di seluruh Kab. Kutai Kartanegara.

Selanjutnya BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara juga diberi amanat sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dalam program ini peranan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menempatkan aparatur sesuai kebutuhan perangkat daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 disusun secara sistematis untuk menjawab isu-isu strategis dengan skala prioritas agar tujuan dan sasaran strategis dapat diwujudkan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan upaya, kerja keras dan sinergitas dari seluruh perangkat daerah, mengingat saat ini nilai indeks profesionalitas ASN masih sangat rendah. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM telah tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel IV-1

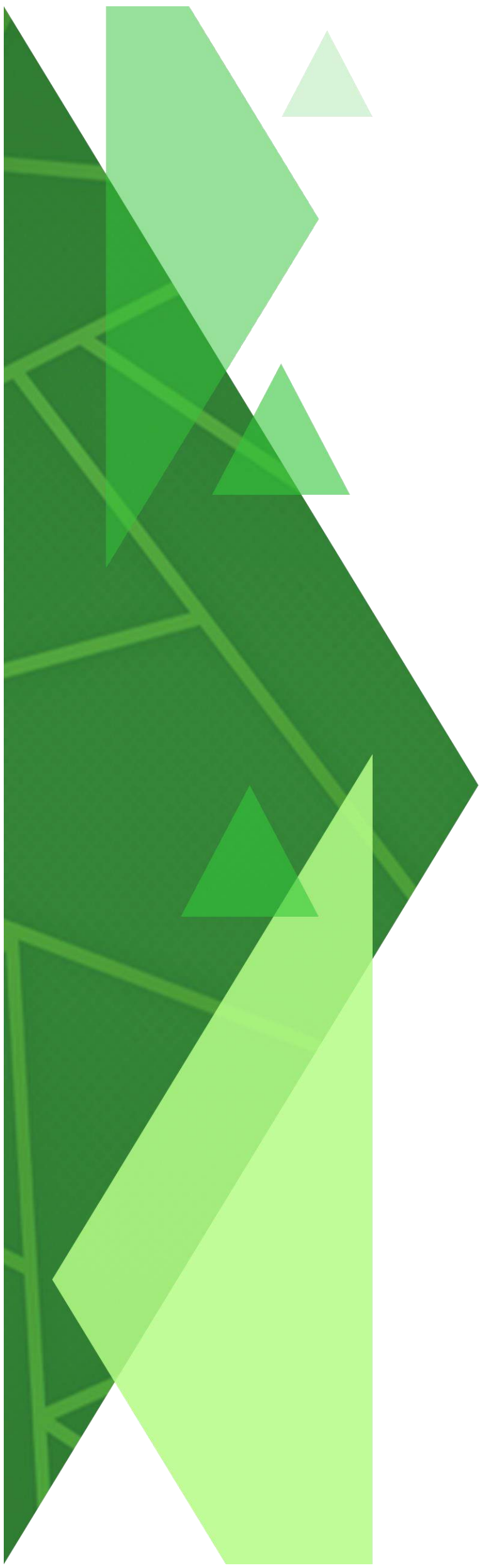
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN								
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		86 Nilai	23.713.350.229,00			87 Nilai	13.792.806.535,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19 dokumen	185.000.000,00			23 dokumen	185.000.000,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	2 dokumen	65.000.000,00	APBD		6 dokumen	65.000.000,00
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	15 dokumen	55.000.000,00	APBD		15 dokumen	55.000.000,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	2 dokumen	65.000.000,00	APBD		2 dokumen	65.000.000,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 laporan	20.395.184.989,00			15 laporan	10.494.651.295,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	1848 orang/bulan	20.250.184.989,00	APBD		1080 orang/bulan	10.344.641.295,00
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1 laporan	50.000.000,00
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	12 laporan	95.000.000,00	APBD		12 laporan	100.000.000,00
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	44.840.000,00			2 Dokumen	45.000.000,00
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	2 laporan	44.840.000,00	APBD		2 laporan	45.000.000,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 dokumen	190.000.000,00			1 dokumen	100.000.000,00

5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kukar	1 paket	140.000.000,00	APBD		1 paket	0,00
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar	- -	-	APBD		30 Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	50 Orang	50.000.000,00	APBD		50 Orang	50.000.000,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	1.061.000.000,00			7 Layanan	1.136.000.000,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1 paket	150.000.000,00	APBD		1 paket	150.000.000,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	3 paket	150.000.000,00	APBD		3 paket	150.000.000,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kukar	3 paket	200.000.000,00	APBD		3 paket	200.000.000,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kukar	1277 dokumen	21.000.000,00	APBD		1277 dokumen	21.000.000,00
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar	- -	-	APBD		2 Paket	75.000.000,00
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	1 laporan	125.000.000,00	APBD		1 laporan	125.000.000,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	1 laporan	315.000.000,00	APBD		1 laporan	315.000.000,00
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	450 dokumen	100.000.000,00	APBD		450 dokumen	100.000.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	387.750.000,00			100 Persen	387.750.000,00
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	37 unit	287.750.000,00	APBD		24 unit	287.750.000,00
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	15 unit	100.000.000,00	APBD		6 unit	100.000.000,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	1.642.261.020,00			12 bulan	1.119.415.240,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	1 laporan	22.000.000,00	APBD		1 laporan	22.000.000,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kukar	1 laporan	170.000.000,00	APBD		1 laporan	170.000.000,00
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1 laporan	112.057.000,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1 laporan	1.338.204.020,00	APBD		1 laporan	827.415.240,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		12 unit	300.000.000,00			12 unit	325.000.000,00
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kukar	12 unit	300.000.000,00	APBD		12 unit	325.000.000,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara		93 persen	4.071.061.000,00			94 persen	3.565.000.000,00

5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan		1147 ASN	1.325.000.000,00			1262 ASN	1.325.000.000,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	1 dokumen	75.000.000,00	APBD		1 dokumen	75.000.000,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	1 dokumen	450.000.000,00	APBD		1 dokumen	450.000.000,00
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kukar	1 dokumen	100.000.000,00	APBD		1 dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kukar	1 lembaga	500.000.000,00	APBD	Program Aparatur Nagara Bahagia	1 lembaga	500.000.000,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kukar	1 dokumen	100.000.000,00	APBD		1 dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1 dokumen	100.000.000,00	APBD		1 dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan		2928 ASN	625.000.000,00			100 Persen	625.000.000,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Kukar	1 dokumen	225.000.000,00	APBD	Program Disapa	1 dokumen	225.000.000,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kukar	1 dokumen	200.000.000,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kukar	1 dokumen	200.000.000,00	APBD		1 dokumen	200.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi		387 ASN	1.581.061.000,00			560 ASN	1.075.000.000,00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kukar	200 orang	350.000.000,00	APBD	Program Disapa	380 orang	350.000.000,00
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	1 dokumen	350.000.000,00	APBD		1 dokumen	350.000.000,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kukar	107 orang	881.061.000,00	APBD		100 orang	375.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		12607 ASN	540.000.000,00			12093 ASN	540.000.000,00
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 dokumen	100.000.000,00	APBD		1 dokumen	100.000.000,00
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 dokumen	125.000.000,00	APBD		1 dokumen	125.000.000,00
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 dokumen	75.000.000,00	APBD		1 dokumen	75.000.000,00
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kukar	348 orang	90.000.000,00	APBD		348 orang	90.000.000,00
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kukar	1 laporan	100.000.000,00	APBD		1 laporan	100.000.000,00
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kukar	35 dokumen	50.000.000,00	APBD		35 dokumen	50.000.000,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								

5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional		20,65	persen	4.152.098.000,00			22,64	persen	2.130.000.000,00
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis		120	ASN	400.000.000,00			200	ASN	400.000.000,00
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kukar	120	orang	400.000.000,00	APBD		200	peserta	400.000.000,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		412	ASN	3.752.098.000,00			122	ASN	1.730.000.000,00
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	12	orang	230.000.000,00			12	orang	230.000.000,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kukar	5	laporan	3.522.098.000,00	APBD		1	laporan	1.600.000.000,00
	JUMLAH					31.936.509.229,00					19.487.806.535,00



BAB V

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kab. Kukar.

Jika dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan upaya rasionalisasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas. Berkaitan dengan kaidah pelaksanaan, Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BKPSDM Kab. Kukar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kukar Tahun 2022 adalah akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023 dengan memperhatikan saran, informasi dan data-data dari masing-masing bidang untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Tenggarong, 10 Agustus 2022
Kepala BKPSDM Kab. Kukar

IA. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003